

Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

¹ Anggita Damingtyas, ² Ni Nyoman Yuliarmi

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Alamat e-mail : anggitalip@gmail.com

ABSTRACT

This research uses an associative quantitative approach which is located in districts/cities of West Java Province which covers 27 districts/cities from 2015-2022. The data used is secondary data from the Central Bureau of Statistics of West Java Province, with a total of 216 observations. The data collection method in this study was non-participant observation with descriptive analysis techniques and inferential analysis (path analysis). The results showed that, 1) Investment did not have a positive and not significant effect, education level had a positive and significant effect, while balancing funds had a positive but not significant effect on economic growth. 2) Investment and economic growth do not have a negative and not significant effect, while the level of education and balancing funds have a negative but not significant effect on the inequality of income distribution between groups of people. (3) There is no indirect effect of the variables of investment, level of education, and balance funds on the inequality of income distribution between groups of people through economic growth in regencies/cities in West Java Province.

Keywords: investment, level of education, balance fund, economic growth, inequality of income distribution

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif yang berlokasi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yang mencakup 27 kabupaten/kota dari tahun 2015-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah pengamatan 216 pengamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi non partisipan dengan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial (analisis jalur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Investasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tingkat pendidikan dan dana perimbangan berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. (3) Tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel investasi, tingkat pendidikan, dan dana perimbangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: *investasi, tingkat pendidikan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana negara Indonesia saat ini telah banyak melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan Indonesia dapat dilihat dari gini rasio (Istiqamah, 2018). Ketimpangan pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah. Masalah pembangunan ekonomi salah satunya adalah distribusi pendapatan yang tidak merata atau disebut ketimpangan. Sederhananya, ketimpangan pendapatan adalah

adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh antar golongan masyarakat. Akibat perbedaan itu maka akan terlihat ketimpangan yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Adanya wilayah yang memiliki faktor-faktor produksi yang lebih dan posisi yang sangat strategis akan mendukung wilayah tersebut berproduksi lebih banyak dibanding wilayah lain. Hal ini akan mendorong wilayah tersebut akan banyak menyerap investasi di daerah tersebut.

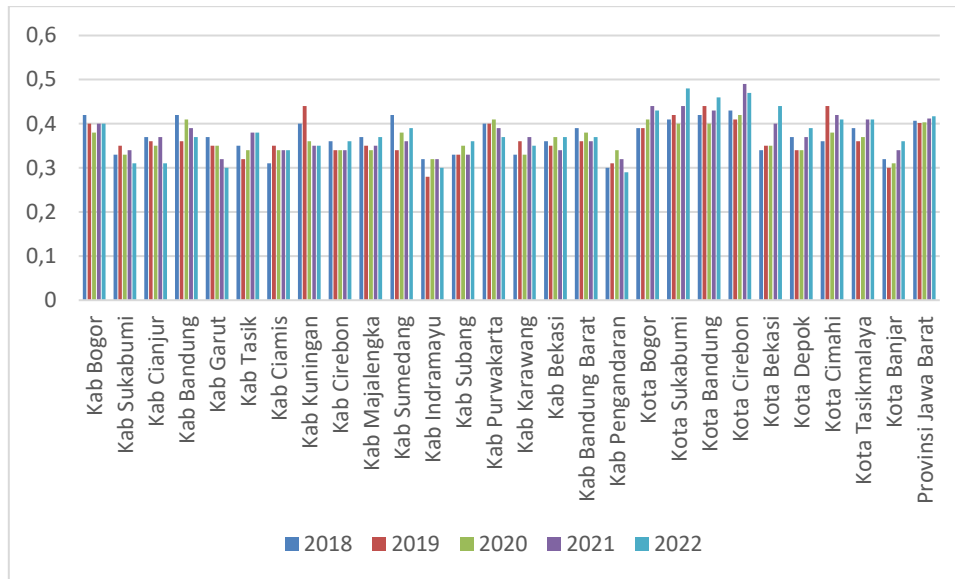
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota dengan masing masing daerah memiliki karakteristik, ekonomi, demografi, dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan kondisi wilayah antara wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan daerah yang terbelakang belum mampu memaksimalkan potensi dalam daerah tersebut dan kurangnya sumber daya yang dimiliki sehingga terjadi jarak antara daerah yang maju dan terbelakang. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan pastinya akan berbeda. Di satu sisi ada wilayah yang pembangunannya relatif lebih meningkat, di sisi lain ada wilayah yang pembangunannya relatif tetap pada suatu titik. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah akibat dari pembangunan yang semakin terpusat di suatu wilayah dan semakin banyaknya pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, serta tenaga terampil membuat pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah. Menurut Kuncoro (2006), pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat mengakibatkan disparitas pendapatan karena tidak diikuti dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak merata, maka akan menyebabkan disparitas pendapatan. Ketimpangan pendapatan sendiri adalah kondisi dimana terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (2009), bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi jauh lebih besar.

Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarannya lebih lengkap. Disisi lain gelombang pencari kerja juga mengalir mengejar kesempatan ke kota-kota besar, ke daerah-daerah yang kaya potensi. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota-kota besar.

Adanya *tradeoff* antara pemerataan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang baik (Kumara, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi sangat merugikan masyarakat, bahkan tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh besar pada masyarakat berpendapatan rendah. Aziz, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa adanya ketimpangan distribusi pendapatan adalah akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dilihat dari

indeks gini. Rasio Gini pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 ditunjukkan Gambar 1.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

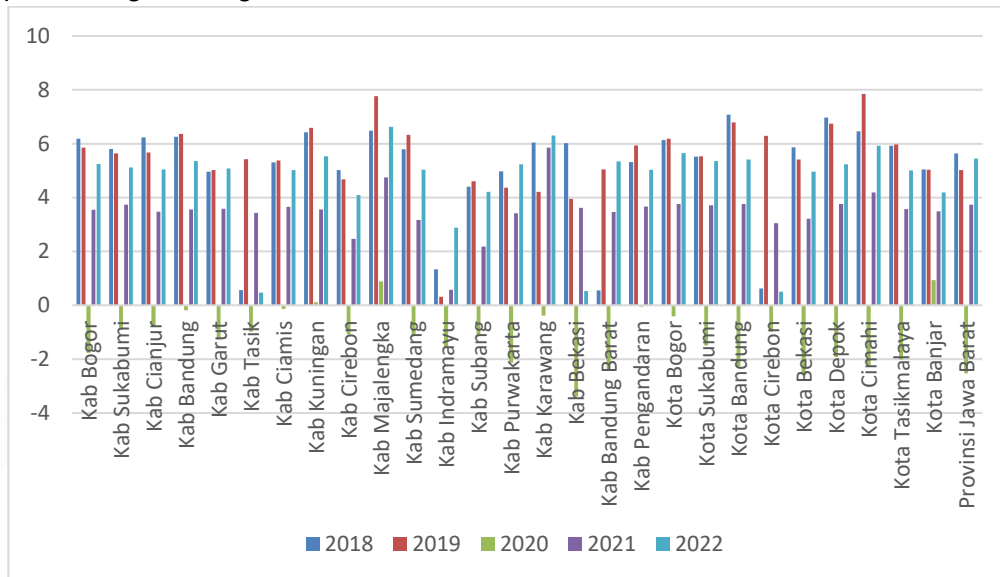
Gambar 1 Rasio Gini pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (dalam poin)

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi disparitas distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang ditunjukkan oleh data rasio gini pada kabupaten/kota yang berfluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi yaitu pada Kota Sukabumi dengan ketimpangan sebesar 0,48 poin pada tahun 2022 yang lebih besar dari ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat provinsi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,417 poin. Sementara ketimpangan distribusi pendapatan terendah yaitu pada Kabupaten Pangandaran dengan ketimpangan sebesar 0,29 poin pada tahun 2022 yang lebih rendah dari ketimpangan distribusi pendapatan tingkat provinsi yang paling rendah yaitu sebesar 0,402 poin pada tahun 2022.

Setiap negara memiliki keinginan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengacu pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan adalah dengan menganalisis potensi ekonomi daerah tersebut. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki, diharapkan daerah yang masih mengalami ketimpangan dapat mengejar pemerataan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Potensi daerah dalam bentuk kekayaan alam atau komoditas unggulan dapat menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan memaksimalkan penggunaan potensi ekonomi yang dimiliki, daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai modal untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik. Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dapat diupayakan dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah saat ini diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah dituntut berperan aktif dalam upaya

mencapai dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Peran pemerintah sekarang menjadi lebih besar, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berperan dalam memimpin, mengelola dan merencanakan perencanaan daerah (Undang-undang No 23 Tahun 2004). Provinsi Jawa Barat bagian selatan memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang beragam. Keanekaragaman potensi ini membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pengembangan setiap daerah di Jawa Barat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga agar potensi ekonomi di daerah tersebut tetap dikelola oleh pihak lokal dan menghindari keterlibatan pihak asing yang dapat berdampak merugikan bagi daerah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (dalam %)

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja ekonomi yang baik yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,45 yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, dan Kota Cimahi. Kabupaten/kota ini mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dan menunjukkan potensi yang kuat dalam pengembangan sektor ekonomi. Sementara itu, dalam kategori pertumbuhan cukup, terdapat sejumlah kabupaten/kota seperti Bandung, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Kota Bekasi, Sukabumi, Kota Cimahi, Sumedang, Kota Sukabumi, Ciamis, Pangandaran, dan Bandung Barat. Meskipun pertumbuhan ekonominya sekitar rata-rata, daerah-daerah ini masih memiliki potensi untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi rendah, di bawah rata-rata. Kabupaten/kota seperti Tasikmalaya, Karawang, Subang, Garut, Purwakarta, Bekasi, Cirebon, Banjar, Bogor, dan Indramayu perlu melakukan upaya lebih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar daerah.

Hal di atas menunjukkan bahwa benar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya meningkatkan pertumbuhannya. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan mencari peluang

untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk mendukung upaya pengembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, diperlukan berbagai data yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan dan evaluasi program pembangunan. Pengembangan sektor-sektor ekonomi di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat bagian selatan yang memiliki potensi dianggap penting, karena diyakini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perekonomian di daerah tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian pusat atau provinsi secara keseluruhan. Ketika perekonomian suatu daerah berkembang, hal ini akan mendorong dan berkontribusi terhadap keberhasilan perekonomian di tingkat pusat atau provinsi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat diharapkan berdampak positif pada perekonomian pusat atau provinsi secara keseluruhan. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat juga diharapkan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat. Untuk itulah diperlukan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun determinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi, tingkat pendidikan, dan dana perimbangan. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan peran strategi yaitu pembentukan modal. Pembentukan modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar keuangan. Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan sebuah investasi dan pinjaman untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dikarenakan kesulitan atau tidak mudah mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan hasil produksi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Berdasarkan penelitian Diannita dan Wenagama (2022) yang menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Hasil penelitian Mansyur, dkk (2021) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Menurut Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Tidak ada satupun negara dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa investasi modal manusia secara substansial. Pendidikan memperkaya pemahaman manusia dan dunia. Pendidikan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dan manfaat sosial yang lebih luas baik untuk individu maupun masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja serta meningkatkan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Bahkan, pendidikan memainkan peran yang penting dalam menyelamatkan kemajuan sosial dan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan. Hasil penelitian Mariana (2015), Handayani *et al* (2016), dan Wau (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hindun, dkk (2019) mengenai pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan

di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena dana perimbangan menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi (Fauzan, *et al.*, 2018). Dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi artinya dana perimbangan sangat diperlukan dan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur ekonomi yang akan menunjang kegiatan investasi swasta. Ketertarikan investor untuk menanamkan modal di daerah muncul karena tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila sebuah daerah ingin meningkatkan investasi swasta, maka dana perimbangan tumbuh secara positif (Santi, *et al.*, 2021).

Berdasarkan dari uraian diatas, dengan adanya ketimpangan di Provinsi Jawa Barat maka diperlukan penelitian lanjut untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat, maka penelitian ini mengambil judul “Kerangka Berpikir Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”.

LANDASAN TEORI

Teori Disparitas Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2015). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan atau indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan diantaranya yaitu sebagai berikut.

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Jadi koefisien Gini yang rendah meng-indikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidak-merataan sempurna (di mana satu orang memiliki atau menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan menurut Todaro (2015) yaitu, lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang, kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.

Kurva Lorenz, adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva

Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Menurut Kaldor ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *propensity to save* (s) yang berbeda: s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh, dan kita anggap bahwa $s_p > s_w$ (sebenarnya penentuan kelompok ini tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh seperti yang dilakukan oleh Kaldor, tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri sosio ekonomis yang lain, misal: kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sektor pertanian dan sebagainya). Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila $s_p > s_w$, maka semakin besar profit share semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin tidak merata pula distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Model Kaldor menunjukkan akan adanya *Trade off* atau pilihan antarpertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang, atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kuznet menyodorkan suatu hipotesis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya berbentuk U terbalik. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah maka akan semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya (Todaro, 2003), seperti pada gambar dibawah ini. Menurut Kuznet pertumbuhan awal seperti dijelaskan dalam model Lewis, dimana pertumbuhan yang terjadi di awal pembangunan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat gini rasio. Penelitian yang dilakukan oleh Darda, dkk, (2021), Sjafrizal (2008) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, ketimpangan pembangunan terjadi karena adanya perbedaan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Kedua, ketimpangan pembangunan antar daerah disebabkan oleh perbedaan kondisi di setiap daerah, di mana beberapa daerah mungkin lebih maju sedangkan yang lain masih terbelakang. Menurut Mubyarto (1995) ketimpangan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ketimpangan antar sektor ekonomi, ketimpangan antar wilayah, dan ketimpangan antar golongan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian suatu Negara dapat dilihat dari semakin kuatnya atau semakin tingginya pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik akan membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian khususnya bagi sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Suatu Negara dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang baik melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan. Taksiran atau indikator jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminology Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB_{RI}) untuk mengeliminasi

pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang dimana di setiap periode masyarakat suatu Negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Sasarannya berupa kenaikan tingkat produksi riil (pendapatan nasional) dan taraf hidup (pendapatan riil perkapita) melalui penyediaan dan pengalokasian proses faktor-faktor produksi. Meningkatnya faktor-faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja yang bertambah, investasi masa lalu dan investasi baru yang menambah barang-barang modal dan kapasitas produksi masa kini yang biasanya diikuti dengan perkembangan teknologi alat-alat produksi yang semua ini akan mempercepat penambahan kemampuan memproduksi.

Teori ekonomi ini menganalisa hubungan antara tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pada tingkat pendapatan nasional tertentu yang cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja dengan tingkat upah di suatu periode berikutnya tidak akan mencukupi lagi untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Hal ini terjadi karena adanya tambahan kapasitas produksi pada periode awal dan tersedia pada periode berikutnya. Diperlukan tambahan dana untuk mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja yang penuh pada periode berikutnya ini dengan menghitung hubungan antara *capital stock* = K dan *output* = Y atau dengan *capital output ratio* (COR). Teori ini disimpulkan bahwa adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal (K) dengan output (Y), yang di formulasikan dalam rasio modal-output (*capital/output ratio*, COR). K disini adalah nilai dari seluruh barang modal yang ada berupa tanah, bangunan, peralatan, dan bahan. Variabel terikat (Y) dapat diukur dengan pendapatan Nasional Kotor atau dengan Produk Nasional Kotor. Semakin tinggi peningkatan stok modal, semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Konsep ini dikatakan bahwa sebagai akibat investasi yang telah dilakukan, pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah dan agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat investasi masa lalu. Penanaman modal diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi atau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan/stok modal (*capital stock*).

Model Pertumbuhan Sollow merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Berbeda dengan model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoretisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat dipilih sebagai

lokasi penelitian karena adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian ilmiah. Permasalahan yang dimaksud adalah adanya disparitas distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang ditunjukkan oleh data gini rasio serta terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2022. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2) dan dana perimbangan (X_3) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Y_2). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel mediasi adalah variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1). Jenis data menurut sifatnya dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau media perantara seperti dokumen (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, yaitu dengan cara observasi non partisipan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian dari buku-buku, karya ilmiah seperti jurnal, artikel, serta data-data yang sesuai. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Persamaan struktural dalam analisis jalur (*path analysis*) dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan

X_1 = Investasi

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Dana Perimbangan

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat

$\beta_1 \dots \beta_7$ = Koefisien jalur untuk masing-masing variabel

e_1, e_2 = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Investasi	216	1.000	47029.000	2023.79799	6230.833463
Tingkat Pendidikan	216	.08	11.86	7.9450	2.56541
Dana Perimbangan	216	52.58	2163.44	1037.0120	531.66536

Pertumbuhan Ekonomi	216	-3.39	7.85	4.0802	2.62763
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	216	.26	.49	.3686	.04210
Valid N (listwise)	216				

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan nilai minimum investasi yaitu sebesar 1 milyar rupiah, nilai maksimum investasi yaitu sebesar 47.029 milyar rupiah, dengan rata-rata investasi sebesar 2.023,7 milyar rupiah. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum yaitu 0,08 tahun, nilai maksimum yaitu sebesar 11,86 tahun dengan rata-rata 7,94 tahun. Variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum yaitu 52,58 milyar rupiah, nilai maksimum yaitu sebesar 2.163,4 milyar rupiah dengan rata-rata 1.037 milyar rupiah. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum yaitu -3,39 persen, nilai maksimum yaitu sebesar 7,85 persen dengan rata-rata 4,08 persen. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan memiliki nilai minimum yaitu 0,26 poin, nilai maksimum yaitu sebesar 0,49 poin dengan rata-rata 0,36 poin.

Hasil uji regresi struktur I digunakan untuk menganalisis pengaruh investasi, tingkat pendidikan, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Analisis data dalam ini diolah dengan bantuan software eviws 13 untuk memperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Struktur 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.718041	0.729239	3.727230	0.0002
X1	-5.791500	6.251500	-0.926501	0.3552
X2	0.170519	0.071941	2.370257	0.0187
X3	0.000102	0.000348	0.292910	0.7699

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.028004	Mean dependent var	3.727968	
Adjusted R-squared	0.014249	S.D. dependent var	2.596307	
S.E. of regression	2.577743	Sum squared resid	1408.689	
F-statistic	2.035973	Durbin-Watson stat	2.023894	
Prob(F-statistic)	0.109885			

Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel 2 menunjukkan hasil output persamaan yang unstandarisasi, sehingga untuk memperoleh nilai persamaan struktural yang terstandarisasi dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Coef Std} = \text{Coef (Std Var/Sd Reg)} \dots\dots\dots(3)$$

Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 menggunakan rumus 3 diperoleh persamaan untuk struktur 1 yaitu sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = -5,639X_1 + 0,165X_2 + 0,0009X_3$$

Keterangan :

- X₁ = Investasi
- X₂ = Tingkat Pendidikan
- X₃ = Dana Perimbangan
- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi data panel struktur 2 digunakan untuk menguji pengaruh investasi, tingkat pendidikan, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketmpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Struktur 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.374548	0.006171	60.69316	0.0000
X1	7.431700	7.591700	0.979038	0.3288
X2	-0.000522	0.000680	-0.768056	0.4434
X3	-4.440600	3.600600	-1.234937	0.2184
Y1	0.000382	0.000573	0.666263	0.5061

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.751499	Mean dependent var	0.449233	
Adjusted R-squared	0.711202	S.D. dependent var	0.179779	
S.E. of regression	0.025603	Sum squared resid	0.121271	
F-statistic	18.64880	Durbin-Watson stat	1.855929	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel 3 juga menunjukkan hasil output persamaan yang unstandarisasi, sehingga untuk memperoleh nilai persamaan struktural yang terstandarisasi dilakukan perhitungan dengan rumus 3. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3 menggunakan rumus 3 diperoleh persamaan untuk struktur 2 yaitu sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = 32,994X_1 - 0,002 X_2 - 19,714X_3 + 0,001Y_1$$

Keterangan :

- X₁ = Investasi
- X₂ = Tingkat Pendidikan

X_3 = Dana Perimbangan

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam perhitungan statistik ini, nilai R^2 yang digunakan adalah adjusted R^2 karena ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan satu variabel independen kedalam satu persamaan regresi. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Persamaan	R Squared	Adjusted R Square
$Y_1 = -5,639X_1 + 0,165X_2 + 0,0009X_3$	0,028	0,014
$Y_2 = 32,994X_1 - 0,002 X_2 - 19,714X_3 + 0,001Y_1$	0,751	0,711

Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel 5 menunjukkan pada persamaan struktur 1 besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (R Square) sebesar 0,028 mempunyai arti bahwa sebesar 2,8 persen variasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variasi investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan dana perimbangan (X_3) sedangkan sisanya sebesar 97,2 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Persamaan struktur 2 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (R Square) sebesar 0,751 mempunyai arti bahwa sebesar 75,1 persen variasi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dipengaruhi oleh variasi investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dana perimbangan (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) sedangkan sisanya sebesar 24,9 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai determinasi total sebesar 0,565 mempunyai arti bahwa sebesar 56,5 persen variasi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dipengaruhi oleh variasi investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dana perimbangan (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y_1), sedangkan sisanya sebesar 43,5 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengujian hubungan struktural pertama dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan dana perimbangan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) yang ditunjukkan pada Tabel 2 pada struktur 1. Nilai koefisien uji t investasi (X_1) sebesar -5,639 dengan taraf signifikansi sebesar $0,355 > 0,05$ angka tersebut jauh lebih besar dari level of signifikan yang berarti investasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X_2) sebesar 0,165 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ yang berarti tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bila tingkat pendidikan (X_2) meningkat sebesar 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi (Y_1) akan meningkat rata-rata sebesar 0,165 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan (X_3) sebesar 0,0009 dengan nilai signifikansi $0,769 > 0,05$ yang berarti dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengujian hubungan struktural kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dana perimbangan (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) yang ditunjukkan pada Tabel 3 pada struktur 2. Nilai koefisien uji t investasi (X_1) sebesar 32,994 dengan taraf signifikansi sebesar $0,328 > 0,05$ angka tersebut jauh lebih besar dari level of signifikan yang berarti investasi berpengaruh tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X_2) sebesar $-0,002$ dengan nilai signifikansi $0,443 > 0,05$ yang berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan (X_3) sebesar $-19,714$ dengan nilai signifikansi $0,218 > 0,05$ yang berarti dana perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar $0,001$ dengan nilai signifikansi $0,506 > 0,05$ yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

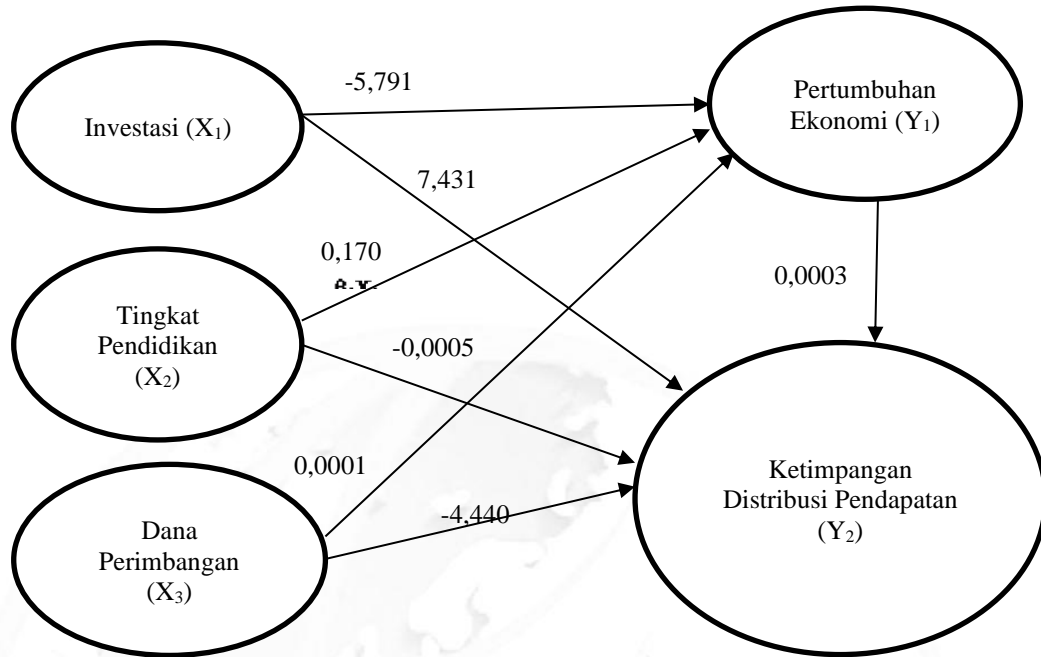
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel investasi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel investasi terhadap variabel ketimpangan pendapatan juga tidak berpengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel investasi (X_1) terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel tingkat pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel dana perimbangan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel dana perimbangan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat juga tidak negatif dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel dana perimbangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan hasil analisis jalur pada struktur 1 yaitu pengaruh investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2) dan dana perimbangan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di dan struktur 2 yaitu pengaruh investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dana perimbangan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar

golongan masyarakat (Y_2) maka hasil koefisien jalur pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Jalur Akhir

Untuk mengetahui besaran nilai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total variabel investasi (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan dana perimbangan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) dan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka dilihat dari nilai *standardized coefficients*.

Tabel 6. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Hubungan Variabel	Pengaruh		Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y_1	
$X_1 - Y_1$	-5,791		-5,791
$X_2 - Y_1$	0,170		0,170
$X_3 - Y_1$	0,0001		0,0001
$X_1 - Y_2$	7,431	-0,002	7,429
$X_2 - Y_2$	-0,0005	0,000051	-0,0004
$X_3 - Y_2$	-4,440	0,000	-4,440
$Y_1 - Y_2$	0,0003		0,0003

Sumber: Data Sekunder, 2023

Keterangan :

- X_1 = Investasi
- X_2 = Tingkat Pendidikan
- X_3 = Dana Perimbangan
- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Investasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan investasi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena investasi di Provinsi Jawa Barat tidak merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat karena investasi cenderung di wilayah utara Provinsi Jawa Barat yang dominan pada sektor manufaktur sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja. Investasi di Provinsi Jawa Barat yang di wilayah selatan cenderung sektor pertanian dan masih tidak meratanya investasi di Provinsi Jawa Barat wilayah selatan.

Investasi yang tepat adalah adanya tambahan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja diberbagai sektor-sektor ekonomi yang pada gilirannya memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk dapat mengakses pekerjaan dan mendapat penghasilan yang layak untuk menopang konsumsi dan investasi di masa akan datang. Investasi yang tidak berorientasi pada penyerapan tenaga kerja yang maksimal, hanya akan menyebabkan pengangguran terus mengalami peningkatan, dan pada akhirnya memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa akan datang.

Menurut penelitian Sulistiawati (2012) rata-rata pertumbuhan investasi tidak sebanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi belum mampu untuk menggerakkan perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bado (2020) bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena investasi yang tidak tepat sasaran. Penelitian Gwijangge (2018) juga menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan tingkat pendidikan yang dalam penelitian ini diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan tingkat pendidikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori *Human Capital* bahwa peningkat pendidikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki skill dan kemampuan yang lebih tinggi sehingga akan mampu memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang baik yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) menerangkan bahwa lamanya seseorang menempuh pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan. Semakin lama seseorang menempuh pendidikan maka akan berakibat pada semakin terasahnya kemampuan dan skill yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Ketika individu tersebut memiliki keahlian yang cakap tentu akan mendorong pada meningkatnya produktivitas yang dihasilkan, hingga pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama Rata-Rata Lama Sekolah seseorang maka semakin

tinggi pula PDRB per kapita suatu daerah. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti Mariana (2015), Handayani *et al* (2016), dan Wau (2021) yang menemukan bahwa pendidikan yang diproses dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jenis dari dana perimbangan yaitu 1) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3) Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Kemenkeu.go.id, 2023). Penelitian Yaqin & Herwanti (2018) penggunaan DAU yang tidak tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, DAU digunakan belanja operasi dari belanja daerah. Jumlah belanja operasional yang tinggi di dominasi oleh besaran jumlah belanja pegawai total belanja daerah. Tingginya proporsi belanja pegawai di tingkat daerah tidak lepas dari adanya berbagai kebijakan pemerintah daerah itu sendiri misalkan pengangkatan tenaga honor daerah yang terus menerus tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran menyebabkan belanja menjadi tidak efisien. Selain itu belanja yang tidak efektif tidak untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

DAU Kota Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2022 dan merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan salah satunya dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zulfa Eliza, *et al.*, (2014) bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Butar (2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh yang tidak signifikan dan bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan investasi memiliki tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Daerah yang sedang mengalami perkembangan dan tingkat investasi yang baik akan memiliki ketimpangan yang rendah. Tidak meratanya investasi di Jawa Barat menyebabkan ketimpangan masih terjadi antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Penyebab tidak efisiennya investasi pada daerah yang tidak merata disebabkan karena perkembangan sangat lambat yang menyebabkan terkonsentrasinya investasi di daerah yang maju mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau bertambahnya ketidakmerataan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pradnyadewi (2017) yang menyatakan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi

Bali 2004-2015. Investasi yang tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat karena untuk mencapai angka disparitas yang rendah diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Effendy & Djohan (2021) yang menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan tingkat pendidikan yang dalam penelitian ini diukur dengan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan tingkat pendidikan menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat namun tidak signifikan. Peningkatan pendidikan seseorang akan menyebabkan seseorang memiliki skill dan kemampuan lebih tinggi sehingga akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan lebih tinggi pula yang akan menunjang distribusi pendapatan antar golongan masyarakat lebih merata. Penelitian ini sesuai dengan *Human Capital Theory* bahwa peningkatan pendidikan mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Todaro (2000) menerangkan bahwa lamanya seseorang menempuh pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan tersebut akan memicu meratanya pendapatan yang juga dapat diartikan disparitas pendapatan menurun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Monika (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat terjadi karena adanya *over-education*, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah pendidikan bisa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Dana perimbangan yang dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum menunjukkan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan dana perimbangan akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat namun tidak signifikan. Jumlah dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Artinya ketika jumlah dana alokasi umum ditingkatkan oleh pemerintah maka masih belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Beberapa penyebabnya antara lain adalah arah kegiatan pada berbagai bidang yang dibiayai oleh DAU tidak mampu berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Bidang-bidang yang selama ini dibiayai oleh DAU hanyalah bidang-bidang

dasar saja seperti bidang infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, infrastruktur irigasi dan lain sebagainya. Selain itu, miss alokasi DAU dan ketidaksesuaian aturan porsi anggaran dengan kebutuhan di daerah juga turut menyebabkan DAU tidak mampu berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pengawasan realisasi belanja DAU supaya DAU yang diberikan pusat ke daerah mampu lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu untuk melakukan deregulasi terkait urusan teknis penentuan porsi arah kegiatan DAU yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan juga memberikan program alokasi DAU untuk dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridho & Wijayanti (2022) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi belum merata dan masih berfluktuasi antar wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat maka akan dapat menyebabkan rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang terjadi di Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2013) bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansyur (2021) hasil temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

Pengaruh Tidak Langsung Investasi, Tingkat Pendidikan, dan Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel investasi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan variabel investasi terhadap variabel ketimpangan pendapatan juga tidak berpengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan juga berpengaruh positif namun

tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak memediasi pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2).

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel dana perimbangan (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Y_2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel dana perimbangan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1).

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menghasilkan simpulan seperti tersebut di bawah ini. Investasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tingkat pendidikan dan dana perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung pengaruh investasi, tingkat pendidikan, dan dana perimbangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi, namun investasi yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta hanya terpusat pada daerah yang memiliki potensi yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan aktifitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan investasi di daerah yang potensinya belum tergalai agar investasi dapat merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Anggaran pendidikan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat kurang dari 20 persen dari APBD khususnya Kota Depok, sehingga harus lebih diperhatikan oleh pihak terkait untuk menunjang kualitas pendidikan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD. Bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Jawa Barat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta prioritas pengembangan masing-masing sektor di kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan dana perimbangan yaitu berkoordinasi secara intens dengan pemerintah pusat agar dana perimbangan dapat terealisasi sesuai target, selain itu pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan dana perimbangan agar digunakan sesuai sasaran serta daerah dapat mengupayakan beberapa yang sesuai dengan kondisi daerahnya untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bado, B. (2020). Analisis Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Econosains*. Vol. 14 No. 2, pp: 25-41
- Darda, T., Patra, I. K., & Mustafa, S. W. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kabupaten Luwu Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 176-182.
- Diannita, Ida Ayu Trisna dan Wenagama, I Wayan. (2022). Pengaruh Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Bali Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 11, No. 3, P. 959-990
- Effendy, C.A., Djohan, S. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota. *Kinerja Jurnal*. Vol 18 No 4, pp: 680-688
- Fauzan, R. (2018). Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0. *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur* Vol 4 (1). Pp: 35-43
- Gwijangge, L., George M.V. K., Hanli, S. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 18 No. 06
- Handayani, N. S., Bendesa, I. K. ., & Yuliarni, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. 5(10), 3449–3474.
- Hindun., Soejoto, A., Hariyanti. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.3, 250-265
- Istiqomah, Amy. (2018). Analisis Partisipan Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), pp.227-235).
- Kuncoro. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori: Masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mansyur, K., Nursini., Hamrullah. (2021). Analysis of the Effect of Economic Growth, Investment and Government Expenditure on Inequality in Regional Development of South Sulawesi Province. *Development Policy and Management Review (DPMR)*. Volume 1 Issue 2
- Mariana, D. R. (2015). Education As A Determinant Of The Economic Growth. The Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197(February), 404–412.
- Mubyarto. (1995). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Edisi Ke-Tiga.LP3S
- Ridho, M.A.M dan Wijayanti, D. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1 Issue 1, 2022: 71-81

- Santi, A. L., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, Vol 1 No 1, pp: 1–10. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.1>
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori, dan Aplikasi*. Sumatra Barat: Baduose Media.
- _____. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang: Baduose Media.
- _____. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2007). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 1, 29-50
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2009). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2000). *Pembangunan Ekonomi. Haris Munandar*. Erlangga, Jakarta.
- _____. (2015). *Economic Development: The Addison-Wesley Series in Economics*.
- Wahyuni, Ribut Nurul Tri dan Monika, Anugerah Karta. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 11 No. 1 Juni 2016 | 15-28
- Wau, T. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan Nias. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 6(1), 39–48.